

***Pendidikan telah memasuki era untuk meningkatkan mutu, relevansi, daya saing serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan yang transparan dan mempunyai akuntabilitas publik. Untuk menjawab kebutuhan perubahan tersebut, perlu reformasi pembangunan pendidikan secara makro maupun mikro.***

Reformasi makro pendidikan terkait dengan pengambilan kebijakan, perencanaan program, strategi pencapaian keberhasilan pendidikan serta regulasi dan kelembagaan pendidikan. Di tingkat mikro menyangkut proses pembelajaran pada setiap satuan jenis dan jenjang pendidikan.

Melalui pelbagai kebijakan yang berkaitan dengan mutu pendidikan, pemerintah bertekad mengembangkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan nasional, sambil terus melanjutkan usaha memperluas pemerataan pendidikan, khususnya melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Untuk menunjang peningkatan mutu, pemerintah mengembangkan sistem penjaminan mutu melalui standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi baik pendidikan formal maupun nonformal.

Untuk standarisasi pendidikan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah mengatur garis-garis besar mengenai pelbagai aspek standar mutu pendidikan, meliputi standar proses, isi, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, pendidikan, dan tenaga pendidikan dan penilaian.

Sebagai subsistem pendidikan nasional PNF dihadapkan pada dua tantangan besar pembangunan PNF. Pertama, bagaimana PNF mampu melaksanakan komitmen nasional untuk mengembangkan mutu pendidikan. Kedua, bagaimana PNF mampu berperan efektif membantu menyelesaikan masalah masyarakat lapisan bawah, yang memiliki keterbatasan akibat ekonomi, geologis, sosial dan demografis. Pendekatan untuk mengintegrasikan aspek mutu dalam mengembangkan program PNF serta melibatkan seluruh stakeholder pendidikan merupakan strategi untuk menjawab tantangan tersebut. Bagi PNF, program-program yang tidak mempertimbangkan mutu tidak akan efektif.

Dalam pendidikan keaksaraan, tantangan mutu terletak pada bagaimana keaksaraan fungsional dapat memberikan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi peserta didik setelah mereka melek aksara. Dalam pendidikan kesetaraan, pendekatan mutu diwujudkan melalui muatan kecakapan hidup (lifeskill) yang dapat mengantarkan para lulusannya memperoleh mata pencarian melalui pembukaan usaha baru atau keterampilan bekerja dunia usaha. Selain itu mutu pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ditentukan pada aspek kecakapan pribadi, intelektual social okasional yang mampu mengembangkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin) menjadi komunitas masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang lebih maju dalam berpikir, bersikap.

Masalah yang dihadapi peserta didik PNF adalah masalah aktual yang memerlukan solusi cepat. Para penyandang buta aksara, anak-anak usia dini yang belum memperoleh

pendidikan memadai, anak-anak yang putus sekolah atau belum/tak pernah bersekolah, penduduk yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan, diskriminasi laki-laki dan perempuan adalah masalah sosial-ekonomi yang membawa bangsa dalam kemiskinan. Pendidikan Nonformal diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut, asalkan dilakukan dengan strategi yang efektif.

Masih tingginya angka buta aksara nasional, sekitar 15,6 juta penduduk berusia 15 tahun pada tahun 2004, di tahun 2005 menurun sedikit menjadi 14,6 juta. Dari jumlah tersebut sekitar duapertiganya adalah kaum perempuan. Dengan kondisi itu, Indonesia masih termasuk 34 negara penyandang buta aksara terbesar.

Menyadari arti penting membarantas buta aksara, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tertanggal 9 Juni 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWBP- PPBA).

Dengan landasan hukum ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan penuntasan buta aksara sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal sebagai penanggung jawab pelaksanaan program telah menyusun strategi, program dan sasaran hingga tahun 2009. targetnya tinggal 5% dari jumlah penduduk atau sekitar 7,5 juta penduduk berusia 15 tahun yang buta aksara.

Sudah tekad pemerintah untuk menuntaskan buta aksara dengan cepat. Masalahnya jumlahnya meningkat akibat masalah sosial ekonomi. Lebih dari itu, pemberantasan buta aksara menempati peran strategis karena akan mengatasi masalah fundamental sumberdaya manusia. Kita menyadari, pendidikan keaksaraan merupakan satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan keaksaraan akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik melalui kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Pada tingkat ini, pendidikan keaksaraan dapat meningkatkan kapasitas peserta didik hingga mencapai kemampuan basic literacy.

Pendidikan keaksaraan juga memberikan keterampilan praktis dan meningkatkan kecakapan warga belajar. Kecakapan tersebut diarahkan pada peningkatan keberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan potensi lingkungannya.

Pendidikan keaksaraan fungsional juga diarahkan dapat meningkatkan kapasitas berpikir dan pengembangan potensi pribadi secara optimal. Pada akhirnya seseorang mampu berperan dalam dinamika kehidupan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan social budaya.

Dengan meningkatnya kapasitas berpikir dan kepribadian, peserta didik keaksaraan fungsional akan lebih mampu menempatkan peran dan aktualisasi dirinya. Termasuk meningkatnya kepercayaan diri dan kesadaran sebagai warga negara.

Itu semua merupakan investasi sumber daya manusia yang secara potensial dapat menggerakkan dinamika pembangunan.

Menurunnya angka buta aksara secara nasional dengan sendirinya akan memperbaiki

indeks pembangunan manusia (HDI) sebagai salah satu parameter kemajuan kualitas SDM.

Secara konsepsi, keaksaraan dapat dijabarkan dalam tiga kategori, yaitu basic literacy, functional literacy, dan advanced literacy. Pengertian basic literacy adalah kemampuan keaksaraan yang paling dasar dimana penilaiannya didasarkan hanya sebatas kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Functional literacy sudah memberikan muatan kecakapan hidup/ keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berperan lebih positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Advanced literacy merupakan tingkat keaksaraan yang paling tinggi. Di sini seseorang sudah memiliki kapasitas melakukan analisis, berpikir konseptual dan kritis, serta mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya untuk memberikan kontribusi yang bernilai bagi kemajuan dan kesejahteraan. Program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan hingga tahun 2009, paling tidak diarahkan untuk dapat mencapai keberhasilan pada tingkat functional literacy, melalui pendidikan keaksaraan fungsional.

Pendidikan keaksaraan diupayakan untuk sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Program ini menggunakan pendekatan peningkatan kecakapan hidup. Acuannya adalah standar keaksaraan yang jelas dan terukur agar hasilnya dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

Gerakan pemberantasan buta aksara nasional, yang dicanangkan melalui Inpres No. 5 tahun 2006, terutama akan diarahkan pada sembilan wilayah provinsi yang tertinggi angka buta aksaranya, yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua.

Melalui Inpres tersebut Departemen Pendidikan Nasional melakukan langkahstrategis yang meliputi, strategi horizontal. Maksudnya pemerintah mengajak segenap komponen masyarakat, termasuk LSM, ormas, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komponen masyarakat lain, agar aktivitas gerakan dapat menjangkau seluas mungkin sasaran.

Dilakukan pula strategi vertikal (jalur birokrasi/sturktural), yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan atau bahkan RW/RT.

Untuk mengintensifkan pemberantasan buta aksara, pemerintah bersama-sama masyarakat akan melaksanakan gerakan Pemberantasan Buta Aksara Intensif (PBAI) menggunakan strategi, pertama melalui program regular. Sejauh ini sudah berlangsung di lembaga-lembaga penyelenggara PNF (PKBM, SKB, BPKB dan BPPLSP). Kedua melakukan assessment dan pendataan untuk mengetahui kondisi dan posisi sasaran/target terkini yang akan dicapai, serta pencapaian program di setiap akhir periodisasi pelaksanaan program. Kegiatan dilakukan ialah melaksanakan quick count, pendataan "by name", kerjasama dan koordinasi dengan BPS, memanfaatkan LAMP (Literacy Assessment Monitoring Program). Ketiga, sosialisasi program melalui berbagai media, termasuk iklan TV, radio, internet dan media cetak. Keempat, lebih intensif memusatkan kegiatan pada kantong-kantong buta aksara, khususnya di sembilan provinsi dengan angka buta aksara tertinggi.

Dengan mempertimbangkan penyelenggaraannya bervariasi, kegiatan akan diarahkan ke kabupaten di luar sembilan provinsi tersebut yang memiliki penduduk buta aksara tinggi, Kelima, membangun kerja sama melalui kemitraan dengan berbagai organisasi sosial/perempuan, keagamaan, masjid, perguruan tinggi dan sekolah. Model pelaksanaan kemitraan disebut dengan strategi pendekatan horizontal. Keenam, menggunakan “kapasitas pemerintahan” dalam program keaksaraan, yaitu dengan memberikan blockgrant untuk pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan/ desa, dan pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan insurksi pemerintahan daerah dalam menggerakkan masyarakat dalam program keaksaraan. Model pelaksanaan ini disebut dengan strategi pendekatan vertical.

Kebijakan pembangunan pendidikan nonformal telah menetapkan tujuan Pendidikan Keaksaraan sebagai salah satu dari 5 tujuan PNF. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan strategis berikut.

Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) dengan strategi vertikal dan horizontal melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam PBA, kerjasama lembaga masyarakat dan sistem voucher melalui “Warung PLS”, pengembangan standar keaksaraan, pengendalian, dan penjaminan mutu PBA, dan menata mekanisme sistem informasi PBA pada unit pemerintahan terdepan.

### ***PAUD menjadi Prioritas***

Menyadari arti pentingnya anak-anak yang termasuk dalam usia 0-6 tahun, pemerintah telah menempatkan PAUD sebagai prioritas lain dari pembangunan pendidikan nonformal. Berdasarkan data, sebagian besar anak-anak usia dini, khususnya 2-4 tahun, belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan perawatan yang memadai. Hingga tahun 2004, jumlah anak-anak usia dini yang mendapatkan pelayanan pendidikan tidak lebih dari 30%.

Kondisi demikian merupakan tantangan pemerintah sambil terus memperbaiki dan mengembangkan mutu penyelenggaraannya. Penanganan pendidikan pada anak usia dini harus dilakukan dengan benar untuk mencegah berkembangnya anak-anak menjadi manusia dewasa yang kurang produktif.

Beberapa pertimbangan berikut merupakan alasan pentingnya pendidikan anak usia dini untuk diperhatikan dan diprioritaskan dalam PNF. Pertama, usia dini 0-6 tahun merupakan masa emas (golden age) bagi perkembangan anak-anak. Kedua, perkembangan kecerdasan anak yang terjadi pada usia dini sangat pesat. Ketiga, perkembangan kecerdasan itu

memerlukan stimulasi yang positif dari lingkungan. Keempat, stimulasi harus diberikan dengan cara yang benar dan dalam porsi yang sewajarnya, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan fisik dan emosi anak secara optimal, serta mampu melejitkan kecerdasan anak. Kelima, pendidikan anak usia dini yang merupakan suatu lingkungan dan perlakuan yang dirancang secara sadar, diarahkan untuk mengembangkan potensi positif anak-anak.

Pendidikan dan perawatan anak usia dini dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Karenanya strategi mengembangkan pendidikan anak usia dini akan diintegrasikan dengan strategi memberikan pelayanan perawatan. Strategi ini akan diimplementasikan hingga ke tingkat operasional pelaksanaan pendidikan dan perawatan, yakni melalui penyelenggaraan, kelembagaan, dan pelayanan terpadu, seperti model POS PAUD (Posyandu- PAUD terintegrasi).

Kebijakan pendidikan nonformal telah menetapkan PAUD sebagai salah satu dari lima tujuan yang ingin dicapai yaitu: memperluas, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan PAUD yang merata, adil dan bermutu dalam rangka membentuk kesiapan belajar anak untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan strategis melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk perluasan dan pemerataan PAUD, pengembangan model inovatif PAUD untuk mencapai standar nasional pendidikan, koordinasi antarsektor dalam pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini, pengendalian, penjaminan mutu, dan pendirian pusat-pusat keunggulan PAUD, dan pengembangan model pembelajaran PAUD berbasis ICT/multimedia.

### ***Pendidikan Kesetaraan***

Program Pendidikan Kesetaraan menempati posisi strategis untuk mengatasi paling tidak tiga tantangan. Pertama, membantu penuntasan program Wajar 9 Tahun, dengan menarik kembali anak-anak putus sekolah di pendidikan dasar dan mengajak anak-anak yang tidak/belum bersekolah karena miskin, untuk mengikuti program kesetaraan Paket A dan Paket B. Kedua, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar kembali anak-anak yang putus sekolah di pendidikan menengah, untuk mengikuti program kesetaraan Paket C. Ketiga, memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja, dan kemampuan merintis dan mengembangkan usaha mandiri, dalam rangka membantu mengatasi pokok persoalan mereka.

Untuk menjawab berbagai perkembangan dinamika masyarakat seperti di atas, seiring dengan peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan, maka diperlukan reformasi pendidikan kesetaraan. Reformasi ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi fungsi pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal, terjaga mutu pelayanan pendidikannya melalui kurikulum, bahan ajar yang induktif tematis dan proses pembelajaran yang ekuivalen dengan pendidikan formal, serta meningkatkan kompetensi peserta didik dengan pendidikan kecakapan hidupnya.

Disadari, diperlukan strategi dan pendekatan khusus dalam implementasi reformasi pendidikan kesetaraan ini, agar peserta didik benar-benar dapat merasakan manfaat pendidikan sesuai kondisi obyektif mereka yang mengalami ketidakberdayaan sosial-

ekonomi. PNF sedang mengembangkan pendidikan kesetaraan sebagai “pendidikan alternatif”. Tujuannya agar peserta didik tidak mendapatkan sistem, muatan, dan perlakuan yang sama dengan yang diperoleh di pendidikan formal dasar/menengah umum.

Pendidikan alternatif ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan, ketertarikan, motivasi, dan potensi yang ada dalam hati peserta didik. Sistem dan model pendidikan kesetaraan akan dikembangkan dengan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, yang mengacu pada dua hal pokok, yaitu penyampaian standar kompetensi lulusan dan penguasaan keterampilan bekerja atau membangun usaha mandiri (berwirausaha).

Salah satu tujuan Pendidikan Kesetaraan yakni mewujudkan pendidikan kesetaraan berbasis kompetensi dan kecakapan hidup secara efektif dan akuntabel untuk menunjang penuntasan Wajib 9 tahun dan pendidikan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan strategis melalui pelaksanaan Paket A/B/C, melalui pendekatan kompetensi, pembelajaran kecakapan hidup yang mengacu pada standar kompetensi pendidikan dasar dan menengah, mengembangkan bahan ajar secara induktif dan tematis, menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah lingkungan, dan pelaksanaan ujian kesetaraan yang berbasis pada pencapaian kompetensi.

### ***Pendidikan Kecakapan Hidup***

Kebijakan pendidikan nonformal untuk PKH ingin melaksanakan dua hal strategis agar PKH dapat efektif. Pertama, mendorong lembaga berwenang untuk mengembangkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan lembaga pendidikan nonformal, termasuk “benchmarking” dengan standar internasional, nasional dan peningkatan mutu lembaga-lembaga kursus di pedesaan, dan mengembangkan mekanisme alih kredit dari satuan pendidikan non-formal terutama lembaga-lembaga kursus kependidikan formal. Kedua, mengupayakan perluasan peserta didik yang orangtuanya miskin dan orang dewasa miskin dan /atau pengangguran. Tujuannya agar peserta didik memperoleh kompetensi untuk menjadi modal untuk usaha mandiri atau bekerja.

Mengingat masih besarnya jumlah mereka, kegiatan strategis ini penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Ketiga, melibatkan seluruh komponen pendidikan khususnya satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi, Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), PKBM, Lembaga Pengembangan/Pemberdayaan Terpadu Masyarakat (LPTM), organisasi sosial, ormas, LSM dan organisasi perempuan.

Selain itu, melibatkan satuan pendidikan formal seperti sekolah kejuruan, politeknik dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi (LPM-PT). Keempat, membangun jaringan kerja dengan stakeholder pendidikan untuk mengembangkan kursus dari kalangan dunia usaha/industri (DUDI), dalam kerangka pengembangan usaha mandiri peserta didik maupun penyaluran di dalam dan di luar negeri.

Kebijakan pembangunan pendidikan nonformal telah menetapkan tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai salah satu dari lima tujuan yang ingin dicapai, yaitu “Melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan keterampilan, keahlian, kecakapan, serta nilai-nilai keprofesionalitas untuk mendorong produktifitas dan kemandirian berusaha bagi pesertanya”.

Untuk itu pemerintah mengembangkan kursus berstandar internasional dan nasional serta inovasi layanan kursus pada masyarakat, merintis model PKH-PLS wirausaha pedesaan, berbasis pengembangan potensi unggulan daerah serta wirausaha bagi penganggur perkotaan termasuk meningkatkan PKHPLS bagi para pekerja, mengembangkan model pendidikan paraprofesi untuk penyeluran kerja di dalam maupun luar negeri, mengembangkan literasi computer ICDL dalam kerangka revitalisasi peran dan fungsi BPKB/SKB untuk memberikan sertifikasi komputer yang berstandar internasional, mengembangkan konsorsium kursus dan pelatihan paraprofesi, meningkatkan mutu dan manajemen kursus melalui standardisasi, akreditasi, uji kompetensi, uji profesi serta sertifikasi berstandar nasional maupun internasional.

### ***Perkecil Kesenjangan Gender***

Isu kesetaraan gender yang menuntut persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, menjadi dasar kebijakan program pengarusutamaan gender (PUG). PUG mengupayakan memperkecil kesenjangan gender di segala aspek penyelenggaraan pendidikan.

Dengan pendekatan PUG, semua perencanaan pembangunan pendidikan, pengembangan kebijakan dan program pendidikan nonformal seperti pemberantasan buta aksara, PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan kecakapan hidup, dirumuskan dan dijabarkan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Hal itu harus tercermin pada indikator dari aspek peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, termasuk para pelaku manajemen dan tenaga struktural dan fungsional.

Pada tataran implementasi, program PUG menempuh strategi seperti penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui persekolahan maupun nonformal, penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengikuti pendidikan prasekolah, meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan, meningkatkan

koordinasi, informasi dan edukasi pada pendidikan berawawasan gender serta meningkatkan koordinasi dan penyebaran Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Untuk mengembangkan Program Peningkatan Budaya Baca, Ditjen PLS memberikan blockgrant bagi masyarakat sebagai dana stimulan untuk menyediakan sarana TBM, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan program ini, Ditjen PLS membuka peluang kepada masyarakat bekerjasama dengan departemen/instansi dan organisasi/masyarakat yang berkepentingan dengan program budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

**Penulis:** wartaplus

[Back to List](#)

**Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal**

Gd. E Lt. III Komp. Depdiknas

Jl. Jend. Sudirman, Senayan - Jakarta 10270

Telp : 021-5725061, 021-5725033, 021-5725486, Fax : 021-5725487, 021-5725484

Hak cipta © 2006 - 2010 | [www.pnfi.depdiknas.go.id](http://www.pnfi.depdiknas.go.id)

<http://www.pnfi.depdiknas.go.id/publikasi/read/20090113095749/PNF-Siapkan-Strategi.html>

**A. Latar Belakang**

TUJUAN PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DASAR adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dituntut peran guru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan globalisasi yang semakin merambah ke desa-desa. Kondisi peserta didik yang belum bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan ini menjadi penyebab terganggunya proses belajar mengajar. Peserta didik lebih banyak melihat permainan teknologi daripada belajar. Apalagi dari orang tua yang kurang memperhatikan karena bekerja sampai larut, dituntut kebutuhan yang semakin meningkat, serta ketidaktahuan orang tua dalam materi pembelajaran yang selalu berganti. Dalam mata pelajaran matematika, peserta didik kurang menguasai materi pelajaran, lebih banyak menghafal dan mengandalkan materi pembelajaran yang mengingat atau menyebutkan. Umumnya tidak tahu makna atau fungsi dari hal yang dipelajari. Padahal mata pelajaran matematika mempunyai peran besar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membandingkan pecahan. Jelas pembelajaran yang membutuhkan problem solving sehingga peserta didik lebih mudah untuk mempelajari konsep-konsep dan gagasan-gagasan matematika bermula dari dunia nyata akan berguna bagi peserta didik dalam kehidupan nantinya.

Peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat dibutuhkan peserta didik, guru yang dapat memberikan pembelajaran dengan berbagai cara agar peserta didik dapat memahami pembelajaran lebih lama akan meningkatkan hasil belajar siswa.

Kesulitan peserta didik kelas 3 dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan pecahan merupakan tantangan bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan peserta didik sehingga memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dalam penelitian tindakan kelas peneliti mencoba menggunakan cara pembelajaran dengan pendekatan problem solving.

Penelitian ditunjukkan pada siswa kelas 3, karena terbukti dari hasil evaluasi belajar berupa tes formatif yang diikuti 25 siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 sebanyak 20 siswa atau 80%, sedangkan yang mendapat nilai 60 keatas hanya 5 siswa atau 25%.



Untuk itu peneliti sebagai guru kelas perlu mengadakan perbaikan pembelajaran yang difokuskan pada penerapan metode problem solving dan kerja kelompok.

### 1. Identifikasi Masalah

Pada saat pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran matematika menjelaskan tentang Perbandingan Pecahan di kelas 3 semester II ternyata guru menemui permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya penguasaan siswa terhadap materi ini. Hal ini terlihat dari hasil tes formatif siswa sebagian belum mencapai tingkat ketuntasan belajarnya, dari 25 siswa yang mencapai nilai tuntas baru 13 siswa (52%), sedangkan 12 siswa belum mencapai hasil yang memuaskan dalam arti belum tuntas (48%).

Selama pembelajaran berlangsung, perhatian siswa terhadap materi pembelajaran agak kurang, saat guru memberikan pertanyaan, siswa tidak menanggapi dengan jawaban yang diterapkan oleh guru, sehingga guru sering juga menjawab pertanyaan sendiri dan merasa heran terhadap siswa.

Dengan demikian peneliti meminta bantuan supervisor untuk mengidentifikasi kekurangan pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi dengan supervisor ternyata terlihat beberapa masalah :

- a. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
- b. Siswa tidak memberikan tanggapan jawaban yang diharapkan guru.
- c. Siswa tidak tertarik pada penjelasan guru.
- d. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
- e. Alat peraga yang digunakan guru belum konkret / nyata.
- f. Guru lebih aktif sendiri dengan metode ceramah yang amat dominant dalam pembelajaran.
- g. Penjelasan guru yang terlalu cepat dan kurang memperhatikan kemampuan masing-masing siswa.
- h. Guru kurang memberi motivasi pada siswa.
- i. Guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka akan dilakukan perbaikan pembelajaran melalui 2 siklus perbaikan tersebut ditekankan pada metode pembelajaran dan penggunaan alat peragayang sesuai.

### 2. Analisis Masalah

Melalui diskusi dengan teman sejawat dan petunjuk dari supervisor ternyata menemukan ketidakberhasilan siswa dalam memahami materi, Perbandingan Pecahan dikarenakan :

- a. Penggunaan metode problem solving
- b. Penggunaan media pembelajaran berupa gambar kartu bilangan

Berdasarkan masalah yang ada, tindakan yang perlu dilakukan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret misalnya buah – buahan dan penggunaan metode yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran, Membandingkan Pecahan. Guna meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.

### B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena dari latar belakang masalah, penulis yang sasarannya penelitian ini adalah perbaikan pembelajaran guru di kelas 3 SD N Pasekan 01 Ambarawa, maka peneliti menyusun masalah bagaimana cara menggunakan atau penerapan metode kerja kelompok yang ditunjang oleh media pembelajaran berupa kartu bilangan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar Membandingkan Pecahan

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan perbaikan pembelajaran yang hendak dicapai peneliti melalui penelitian tindakan kelas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan pembelajaran matematika dengan menggunakan media kongkrit seperti tabel pecahan dan buah – buahan, motivasi dan hasil belajar siswa pada materi menjelaskan perbandingan pecahan di SD N Pasekan 01 Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok materi membandingkan pecahan.

### D. Manfaat Perbaikan

Manfaat yang telah diperoleh dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat berarti bagi guru, pembelajaran siswa maupun bagi pendidikan pada umumnya. Adapun manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah, sebagai berikut :

#### 1. Manfaat bagi guru

- a. Membantu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Guru dapat berkembang secara professional, sebagai guru harus dapat meningkatkan diri bahwa dirinya telah mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.
- c. Membuat guru percaya diri.
- d. Membantu guru untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki.

#### 2. Manfaat bagi siswa

Meningkatkan proses hasil belajar siswa. Dengan PTK kesalahan dalam proses pembelajaran akan dapat dianalisis dan diperbaiki sehingga kesalahan tidak akan berlanjut serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

#### 3. Manfaat bagi sekolah

Dengan melakukan penelitian di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru dalam pengelolaan kegiatan sekolah secara keseluruhan, sehingga sekolah tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang.

#### 4. Manfaat bagi pendidikan

Dengan terbiasa guru melaksanakan PTK dapat dihasilkan strategi cara pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran, untuk itu dapat disebarluaskan kepada guru maupun sekolah lain melalui KKG diskusi dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya.

- [click link](#)
- 1180 clicks

<http://one.indoskripsi.com/node/3089>